Pertanggungjawaban Pidana Penerimaan Gaji Aparatur Sipil Negara Secara Ilegal Dalam Tindak Pidana Korupsi

Arif Suhartono, M. Said Karim, Marwati Riza

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

E-mail: marwati.riza@unhas.ac.id

Abstract

The study aims to analyze the rights of salaries of civil servants who are undergoing legal proceedings and analyze the qualifications of criminal acts of corruption within the scope of the State Civil Apparatus. This research is a normative research with statute and cases approaches. The location of the study was conducted in the jurisdiction of the Soppeng District Attorney General's Office and SKPD in Soppeng District, South Sulawesi. The results of the study indicate that the rights to salaries and benefits of civil servants who are undergoing legal proceedings are regulated in Article 281 of Government Regulation Number 11 of 2017 concerning Management of ASNs. Instead, it is given temporary stop money. Temporary termination money is given at 50% of the last position income as an ASN before being temporarily dismissed in accordance with the provisions of the legislation. The temporary termination money is given in the following month from the stipulation of a temporary stop.

Keywords: State Civil Apparatus; Corruption; Criminal act

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak atas gaji pegawai negeri sipil yang sedang menjalani proses hukum serta menganalisis kualifikasi tindak pidana korupsi dalam lingkup Aparatur Sipil Negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Soppeng dan SKPD Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak atas gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil yang sedang menjalani proses hukum diatur dalam Pasal 281 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN dimana ASN yang diberhentikan sementara karena ditahan sebagai tersangka tidak diberikan penghasilan. Sebaliknya, diberikan uang pemberhentian sementara. Uang pemberhentian sementara diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai ASN sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Uang pemberhentian sementara tersebut diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya pemberhentian sementara.

Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara; Korupsi; Tindak Pidana

1. Pendahuluan

Dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan, maka ASN sebagai unsur aparatur negara dituntut untuk setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, guna mewujudkan aparatur negara yang profesional, akuntabel dan bermartabat.

Dalam kaitannya dengan kinerja Pegawai Negeri Sipil, permasalahan yang cukup krusial dalam kehidupan berbangsa adalah permasalahan korupsi. Karena apabila seorang ASN melakukan tindak pidana korupsi, maka semua bentuk pelayanan publik akan ikut terganggu yang pada akhirnya menyebabkan kemunduran bangsa.¹ Korupsi di lingkup pemerintahan kerap terjadi dikarenakan banyaknya celah untuk melakukan korupsi, seperti dalam hal penggunaan anggaran yang seringkali dimanfaatkan untuk keperluan pribadi bahkan untuk keperluan kelompok tertentu (*nepotisme dan kolusi*) hal ini merupakan gangguan dan hambatan dalam melaksanakan pembangunan di suatu daerah

Korupsi merupakan suatu perbuatan yang merugikan keuangan negara dan terkadang dapat merugikan pula perekonomian suatu negara. Pada Pasal 3 UU Tipikor, sangatlah jelas disebutkan bahwa “karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara”. Hal ini berarti siapapun yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam pemerintahan sangatlah rawan melakukan tindak pidana korupsi, karena kesempatan dan kewenangan yang ada padanya apabila dilaksanakan tanpa kehati-hatian berpotensi merugikan keuangan negara.²

Salah satu kasus yang menarik perhatian kalangan penyidik terutama penyidik tipikor Kejaksaan Negeri Soppeng, Sulawesi Selatan, adalah ditemukannya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, dimana didiuga pelakunya adalah seorang Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Soppeng atas nama Ibu Ir. Yuliana, M.Si.

Terhadap kasus korupsi tersebut, Ibu Yulianti selaku Kepala Dinas telah melakukan pembiaran dengan tetap memberikan gaji kepada ketiga ASN bawahannya yang terlibat kasus korupsi, padahal dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa: (1) sebelum ASN dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu ASN yang didiuga melakukan pelanggaran disiplin, (2) pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan, (3) apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada ASN tersebut merupakan kewenangan: a. Atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin, b. Pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan.

Lebih lanjut, Pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, yang dinyatakan bahwa untuk kepentingan peradilan seorang Pegawai Negeri yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubungan dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara. Kemudian pada Pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa kepada seorang Pegawai Negeri yang dikenakan pemberhentian sementara menurut Pasal 2 ayat (1) peraturan ini: a. Jika terdapat petunjuk-petunjuk yang cukup meyakinkan bahwa ia telah melakukan pelanggaran yang didakwakan atas dirinya mulai bulan berikutnya ia diberhentikan diberikan bagian gaji sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari gaji pokok yang diterimanya terakhir, b. Jika belum terdapat petunjuk-petunjuk yang jelas tentang telah dilakukannya pelanggaran yang didakwakan atas

¹ Hartini, Sri., dkk, 2008, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika. Hlm. 36

² Nurhayati, R., & Gumbira, S. W. (2017). Pertanggungjawaban Publik dan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6 No. (1), 41-66.

dirinya mulai bulan berikutnya ia diberhentikan bagian gaji sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari gaji pokok yang diterimanya terakhir.

Akan tetapi, Atasan langsung tidak melaksanakan pemeriksaan kepada ketiga ASN yang terlibat korupsi sehingga ketiga ASN tersebut tetap menerima gaji selama menjalani proses hukum, sehingga perbuatan tersebut digolongkan sebagai perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Jumlah kerugian negara yang ditemukan penyidik tipikor kejaksaaan negeri soppeng sebesar Rp. 198.084.000. ironisnya kasus tersebut bukan merupakan kasus yang pertama terjadi, sebelumnya telah terjadi kasus serupa di beberapa kabupaten di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus (*case approach*). Lokasi penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Soppeng dan SKPD Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif, yaitu dengan cara menggambarkan keadaan yang nyata mengenai fenomena korupsi di kalangan Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan hasil wawancara dan studi kepustakaan yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif.

3. Hak Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil yang Sedang Menjalani Proses Hukum

Pelanggaran disiplin oleh aparatur sipil negara masih sering ditemui dalam berbagai instansi pemerintahan. Ketidakdisiplinan ASN terlihat dari masih adanya ASN yang terlambat masuk kerja, pulang lebih awal, berada di luar wilayah kantor di saat jam kerja, bahkan terlibat dalam tindak pidana. Rendahnya kualitas disiplin dan etos kerja ASN merupakan akar penyebab pelayanan publik yang kurang berkualitas. Hal ini juga akan berdampak pada munculnya perilaku ASN yang bisa menyimpang seperti KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), sehingga dapat berakibat kepada kualitas pelayanan publik yang tidak akuntabel dan tidak transparan.³

Salah satu faktor penyebab terjadinya ketidakdisiplinan ini karena pembinaan, pengawasan dan sanksi yang dilakukan dan dijatuhkan selama ini tidak berjalan optimal. Disiplin lemah, pengawasan juga lemah, sanksi lebih lemah lagi dan cenderung pilih kasih sehingga tidak berwibawa di mata korps pegawai negeri. Hal ini bisa juga dimungkinkan karena indikasi penilaian kerja di jajaran ASN masih belum objektif, sehingga masih jauh dari harapan dan profesionalisme, tidak tegas, dengan indikasi sarat KKN.

Dalam rangka peningkatan disiplin ASN sebagai abdi negara dan masyarakat diperlukan pembinaan dan pengawasan terus-menerus. Pemerintah melalui PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil (ASN) dilakukan secara bertahap sejak pengangkatan, penempatan, pendidikan dan latihan, pemindahan, penghargaan, serta pemberhentian, dengan selalu mengacu kepada kode etik dan peraturan disiplin yang diberlakukan. Semua itu dilakukan dengan tujuan untuk mengoptimalkan kinerja sumber daya aparatur.

³ Ermasyah Djaja. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.21

Penegakan disiplin harus menjadi nafas bagi setiap aparatur negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dengan ukuran-ukuran yang jelas sebagai parameter penilaian. Dengan indikator-indikator yang ditetapkan, maka *reward* and *punishment* juga bisa diterapkan secara konsisten. Dalam hal ini, diperlukan pengawasan yang tidak saja dari atasan langsung, tetapi juga dari luar. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010, ASN tidak bisa berkilah lagi, dan disiplin tak bisa ditawar-tawar. "Pemerintah telah menyiapkan parameter penilaian aparatur. Jadi sanksi juga sudah ditetapkan, sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Selain itu, pengawasan terhadap disiplin kerja ASN juga akan ditingkatkan. Untuk itu, setiap instansi pemerintah perlu mengembangkan budaya kerja di lingkungannya masing-masing. Perubahan pola pikir dan peningkatan budaya kerja pada dasarnya merupakan inti dari reformasi birokrasi. SDM aparatur negara harus mendahulukan kewajiban daripada hak, mengutamakan peran bukan wewenang serta untuk melayani, bukan untuk dilayani.⁴

Pada tataran normatif, ASN yang menjadi tersangka tindak pidana, tidak diberikan penghasilan berupa gaji, namun hanya diberikan uang pemberhentian sementara yang besarnya 50% dari gaji terakhir ASN tersebut. Hal ini berbeda dengan pengaturan pada PP Nomor 4 tahun 1966 yang mengklasifikasi jenis pelanggaran terkait dengan ASN yang diduga melakukan tindak pidana, dimana dalam ketentuan Pasal 4 PP 4 Tahun 1966 tersebut atasan langsung jika:

- a. Terdapat petunjuk-petunjuk yang cukup meyakinkan bahwa ia telah melakukan pelanggaran yang didakwakan atas dirinya mulai bulan berikutnya ia diberhentikan diberikan bagian gaji sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari gaji pokok yang diterimanya terakhir;
- b. Jika belum terdapat petunjuk-petunjuk yang jelas tentang telah dilakukannya pelanggaran yang didakwakan atas dirinya mulai bulan berikutnya ia diberhentikan diberikan bagian gaji sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) gaji pokok yang diterimanya terakhir.

Pada pengaturan pemberhentian sementara dalam PP Nomor 11 Tahun 2017, pertimbangan yang demikian tidak lagi digunakan, indikator yang digunakan hanyalah bahwa ASN tersebut di tahan karena menjadi tersangka Tindak pidana. Jadi terdapat 2 (dua) unsur yang harus terpenuhi dalam rumusan ketentuan tersebut, yang pertama adalah menjadi **tersangka**, dan yang kedua adalah **ditahan**. Dalam hal seorang ASN menjadi tersangka dan tidak dilakukan penahanan terhadapnya, maka yang bersangkutan tetap berhak menjadi ASN dan menerima hak-hak kepegawaian berupa gaji seperti biasanya.

Menurut penulis, jika kita melihat klausul pengaturan yang mana pemberhentian sementara ini dilakukan jika yang bersangkutan di tahan, maka dapat disimpulkan bahwa pembentuk undang-undang membatasi hak ASN yang berkaitan dengan gaji, bukan karena yang bersangkutan menjadi tersangka, melainkan karena apabila yang bersangkutan ditahan, maka yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, gaji yang bersangkutan harus dihentikan, dan hanya diberikan uang pemberhentian sementara.

⁴ Prabu, Anwar Mangkunegara, 2004, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 35

Pengusulan pemberhentian sementara dilakukan secara hierarki oleh pejabat pembina kepegawaian dan dapat pula dilakukan berdasarkan pendelegasian kewenangan. Terkait dengan siapa yang menjadi pejabat kepegawaian pada setiap instansi. PPK juga berwenang menetapkan hukuman disiplin terhadap ASN ASN yang diperbantukan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah serta jabatan fungsional umum golongan ruang IV/e ke bawah, ASN yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan ASN yang dipekerjakan atau diperbantukan pada negara lain, atau badan internasional, atau tugas di luar negeri.

Terdapat 6 (enam) jenis jabatan yang dapat menetapkan hukuman disiplin bagi ASN di instansi daerah, yakni:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota;
2. Sekretaris daerah Kab/Kota;
3. Pejabat struktural eselon II;
4. Pejabat struktural eselon III;
5. Pejabat struktural eselon IV; dan
6. Pejabat struktural eselon V.

Masing-masing jabatan tersebut di atas, dapat menetapkan hukuman disiplin bagi ASN daerah sesuai dengan jenis sanksi yang diatur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.⁵

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa penjatuhan sanksi termasuk dengan pelaporan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan bahwannya dilakukan oleh atasan langsung dan bersifat wajib. Dalam hal atasan melakukan pembiaran terhadap bawahannya yang melakukan pelanggaran disiplin, maka atasan tersebut dapat dijatuhi sanksi yang sama. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 21 PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin ASN yang pada intinya mengatur sebagai berikut:

- (1) Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada ASN yang melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Apabila Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada ASN yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya.
- (3) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada ASN yang melakukan pelanggaran disiplin.
- (4) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan hukuman disiplin terhadap ASN yang melakukan pelanggaran disiplin.

Pada ketentuan Pasal 22 PP 53 tersebut, diatur bahwa apabila tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa pembiaran terhadap pelanggaran yang dilakukan terhadap bawahan serta pembiaran terhadap hak-hak yang diterima bawahan yang seharusnya dibatasi, menjadi tanggung jawab atasan langsungnya. Dalam kaitannya dengan kasus dimana seorang ASN masih menerima gaji penuh, sementara yang bersangkutan sedang di tahan sebagai tersangka

⁵ Malayu, S.P Hasibuan, 2002, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm 11

suatu tindak pidana, maka atasan yang melakukan pembiaran tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban.

4. Kualifikasi Tindak Pidana Korupsi Terhadap Atasan yang Tidak Menghentikan Proses Penerimaan Gaji

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang sering dilakukan secara terencana, sistematis dan merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, merusak sendi-sendi kehidupan ekonomi nasional serta merendahkan martabat bangsa di forum internasional.⁶ Dengan demikian, pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa oleh karena itu penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus diatur secara khusus.

Menurut A. Hamzah,⁷ korupsi sesungguhnya merupakan suatu istilah yang sangat luas pengertiannya, dengan demikian pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah korupsi bermacam ragam pula. Lebih lanjut, pengertian tindak pidana korupsi jika diartikan secara harfiah dapat diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan menghina atau memfitnah.⁸

Dari pengertian di atas, maka tindak pidana korupsi tidak terbatas pada suatu tindakan seorang pejabat tetapi juga mencakup persoalan moral serta masalah ucapan seseorang. Menurut Leden Marpaung pengertian tindak pidana korupsi dalam arti luas yaitu: Perbuatan seseorang yang merugikan keuangan negara dan yang membuat aparat pemerintah tidak efektif, efisien, bersih dan berwibawa.⁹

Dari beberapa pengertian tindak pidana korupsi yang telah di kemukakan di atas, maka menurut Husein tindak pidana korupsi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:¹⁰

- a) Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang.
- b) Korupsi pada umumnya dilakukan penuh kerahasiaan.
- c) Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
- d) Korupsi dengan berbagai macam akal berlingkup di balik pembenaran hukum.
- e) Mereka yang terlibat korupsi adalah yang menginginkan keputusan yang tegas dan mereka mampu mempengaruhi keputusan.
- f) Tindakan korupsi mengandung penipuan baik pada badan publik atau masyarakat.
- g) Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.
- h) Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

Dengan memiliki unsur tindak pidana korupsi yang ditempatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka setiap perilaku atau tindakan setiap korporasi yang memenuhi rumusan delik diatas, dapat kepadanya dikenakan sanksi sesuai dengan

⁶ Basir Rohrohmana. 2017. The Element of Unlawful in Corruption (A Study of the Court's Decision of Corruption in the District Court Class IA Jayapura), *Papua Law Journal*. Volume 1, Issue 2: 203-219.

⁷ A. Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, Hal.. 4-5.

⁸ *Ibid*, Hal.. 4-5.

⁹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah Dan Pemecahannya*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992, Hal.. 149.

¹⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Bandung, Mandar Maju, 2001, Hal.. 12.

ketentuan yang berlaku. Dalam praktek, kita kenal korupsi dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:

a. Administrative Corruption

Segala sesuatu yang dijalankan adalah sesuai dengan hukum peraturan yang berlaku. Akan tetapi, individu-individu tertentu memperkaya dirinya sendiri. Misalnya, proses rekrutmen pegawai negeri, di mana dilakukan ujian seleksi mulai dari seleksi administrative sampai ujian pengetahuan atau kemampuan. Akan tetapi, yang harus diluluskan sudah tentu orangnya. Demikian juga dalam pemenangan tender, calon Gubernur, walikota atau Bupati selama Orde Baru, di mana pemilihan/seleksi seakan-akan diadakan, tetapi pemenangnya sudah ditentukan terlebih dahulu.

b. Against The Rule Corruption

Against the rule corruption artinya korupsi yang dilakukan adalah sepenuhnya bertentangan dengan hukum. Misalnya penyuapan, penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Rumusan korupsi menurut peraturan tersebut, dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni:

- i. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun juga untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian Negara.
- ii. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan atau material baginya.

Memperhatikan rumusan Pasal 2 sampai dengan Pasal 17 serta Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pelaku tindak pidananya adalah: "*setiap orang yang berarti orang perseorangan atau korporasi*". Sedangkan menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir, baik berupa badan hukum maupun tidak berbadan hukum. Badan hukum di Indonesia terdiri dari Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi dan *Indonesische Maatschappij op Aandelen* (IMA), sementara perkumpulan orang yang tidak berbadan hukum dapat berupa *Firma* (Fa), *Commanditaire Vennootschap* (CV).

Dalam ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di samping Pegawai Negeri, yang dapat menjadi pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah Penyelenggara Negara, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dimaksudkan dengan Penyelenggara Negara adalah pejabat Negara yang menjalankan fungsi Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif dan Pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menelaah kasus yang berkaitan dengan adanya pembiaran yang dilakukan seorang atasan ASN yang tetap memberikan gaji penuh terhadap bawahannya yang sedang ditahan sebagai tersangka tindak pidana, penulis menelaah hal tersebut sebagai suatu

tindak pidana korupsi sebagaimana di tentukan pada Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

a. Unsur “Setiap Orang”

Unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah terletak pada adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan di dalam Pasal 3 yang tidak terdapat pada Pasal 2. Pelaku tindak pidana korupsi hanya orang perseorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan, sedangkan korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana tersebut dalam Pasal 3.¹¹ Dengan demikian unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 3 memiliki sifat kekhususan tersendiri, yang tidak terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Dengan demikian, sesuai dengan asas spesialisitas, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling dihadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan status personalitas, dalam hal ini atasan ASN yang masih memberikan gaji kepada ASN bawahannya yang tidak berhak, maka dalam perkara tersebut, atasan tersebut dapat dikualifisir sebagai setiap orang sebagaimana termaktub dalam dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

b. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi”

Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung makna yang bersifat alternatif. Kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur yaitu apakah menguntungkan diri sendiri, atau menguntungkan orang lain, atau menguntungkan suatu korporasi, berarti telah memenuhi unsur tersebut. Yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada.¹² Yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya.

¹¹ R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2005, halaman 37

¹² Supriyanto, Supanto, Hartiwiningsih. (2017). Redefinisi Unsur “yang Dapat Merugikan Keuangan (Perekonomian) Negara” dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Amanna Gappa, 25 (2): 7-18

Dengan demikian, yang dimaksud dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.¹³ Berdasarkan Yurisprudensi mahkamah Agung RI No.813K/ PID/1987, tanggal 29 Juni 1989, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau Kedudukan.

c. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan Kesempatan atau Sarana yang ada karena Jabatan atau Kedudukan”

“Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau sarana yang ada pada nya karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut; untuk mencapai tujuan penguntungan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dalam Pasal 3, ada 3 cara yang secara alternative dapat ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.
2. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.
3. Dengan menyalah gunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Pada umumnya “Kesempatan” ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut.

d. Unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

Unsur ini menurut bersifat alternatif, artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara a quo adalah dalam dua indikator, yaitu: 1) yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian negara. Merugikan adalah sama artinya dengan Menjadi Rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “Merugikan Keuangan Negara” sama artinya dengan menjadi Ruginya Keuangan Negara atau bekurangnya Keuangan Negara; 2) yang merugikan Keuangan Negara atau perekonomian negara. “Keuangan Negara” didalam penjelasan umum UU nomor 31 tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a) Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah.
- b) Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan Modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

¹³ Sugiantari, A.A.P. (2017). Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Penggunaan Wewenang oleh Pejabat Publik. *Jurnal Hukum Advokasi*, Vol. 7 No. (1).

5. Penutup

Hak atas gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil yang sedang menjalani proses hukum diatur dalam Pasal 281 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN dimana ASN yang diberhentikan sementara karena di tahan sebagai tersangka tidak diberikan penghasilan. Melainkan ASN tersebut diberikan uang pemberhentian sementara. Uang pemberhentian sementara diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai ASN sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Uang pemberhentian sementara tersebut diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya pemberhentian sementara.

Atas dasar tersebut, diperlukan pengaturan komprehensif yang berkaitan dengan mekanisme pengawasan atasan yang tidak melakukan penindakan terhadap ASN bawahannya yang telah melakukan pelanggaran disiplin, khususnya yang berstatus tersangka tindak pidana. Terhadap atasan yang melakukan pembiaran tersebut, perlu diberikan sanksi yang lebih berat dari sanksi disiplin yang seharusnya diterima bawahannya. Pihak yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap seorang ASN yang disangkakan melakukan tindak pidana, diharapkan melakukan koordinasi dengan atasan ASN yang bersangkutan, tidak hanya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan ASN, melainkan juga berkaitan dengan penghentian sementara hak-hak kepegawaianya.

Referensi

- Adami Chazawi. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Penerbit Bayu Media Publisng, Malang.
- Andi Hamzah, 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Basir Rohrohmana. 2017. The Element of Unlawful in Corruption (A Study of the Court's Decision of Corruption in the District Court Class IA Jayapura), *Papua Law Journal*. Volume 1, Issue 2: 203-219.
- Ermasyah Djaja. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika
- Hardijanto, 2003, *Pembinaan Kepegawaian Dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta, Makalah disampaikan pada Diklatpim Tingkat II. LAN.
- Hartini, Sri., dkk, 2008, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Malayu, S.P Hasibuan, 2002, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Bandung, Mandar Maju.
- Nurhayati, R., & Gumbira, S. W. (2017). Pertanggungjawaban Publik dan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6 No. (1), 41-66.
- Prabu, Anwar Mangkunegara, 2004, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- R. Wiyono. 2005. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

- Setiyono H. 2003. *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Jakarta.
- Sugiantari, A.A.P. (2017). Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Penggunaan Wewenang oleh Pejabat Publik. *Jurnal Hukum Advokasi*, Vol. 7 No. (1).
- Supriyanto, Supanto, Hartiwiningsih. (2017). Redefinisi Unsur “yang Dapat Merugikan Keuangan (Perekonomian) Negara” dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Amanna Gappa*, 25 (2): 7-18